

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ginting, Darwin, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- H.S, Salim, 2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismaya, Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Murad, Rusmadi, 2013, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1991, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- , 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pres), Jakarta.
- Soetomo, 1984, *Pembebasan, Pencabutan, Permohonan Hak Atas Tanah*, Usana Offset Printing, Malang.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2016, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriyadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wibawanti, Erma Sri dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tannah Dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

Widjaya, I.G. Rai, 2002, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Bekasi Timur.

Windari, Ratna Arta, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2004).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533).

Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah (Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 110-591 Tahun 1999).

Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 500-4352 Tahun 1999).

### **Peraturan Direktur PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

Instruksi Direksi No:11/JB.306/KA.2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal Pemanfaatan Lahan.

Keputusan Direksi No: Kep.U/JB.310/X/13/KA-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Kebijakan Penyewaan Lokasi Komersial di Lingkungan *Railways Asset* PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Instruksi Direksi No:7/JB.310/KA-2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penyewaan Lokasi Komersial Di Lingkungan Luar Stasiun.

### **Internet**

<http://www.banjarnegarakab.go.id/-menguak-asal-mula-kabupaten-banjarnegara>